

Dewan: Evaluasi Kinerja Bidang Aset

MEMPAWAH. Pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Pontianak yang selalu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun anggaran membuat DPRD gerah.

Anggota DPRD MA Muhammadiyah mendesak pemerintah daerah mengevaluasi kinerja bidang aset. Karena adanya temuan tersebut menunjukkan bidang bersangkutan tidak bekerja maksimal.

"Hasil audit BPK yang setiap tahun mengungkapkan adanya temuan masalah aset menunjukkan, kalau bidang itu tidak bekerja dengan baik. Karenanya, bupati mesti melakukan evaluasi. Pilih pejabat yang mampu untuk menangani permasalahan aset ini," tegas Muhammadiyah kepada koran ini, Jumat (6/7) di Mempawah.

Menurut Legislator Partai

Persatuan Pembangunan (PPP) ini, apabila permasalahan aset ini dibiarkan berlarut dan tidak diselesaikan, maka akan menumpuk dan menimbulkan permasalahan yang lebih besar ke depan.

"Buktinya pada tahun ini bupati melaporkan jumlah aset kita naik sebesar 35,47 persen. Yakni dari Rp825, 59 miliar menjadi Rp1,118 triliun. Ini merupakan masalah baru, kenapa aset kita bisa membengkak seperti itu dalam satu tahun anggaran," sesalnya mempertanyakan.

Terkait penambahan aset itu pun, Sekretaris Fraksi PPP DPRD Kabupaten Pontianak ini menuntut pemerintah daerah transparan. Sebab, dia mengaku selama ini tidak pernah ada koordinasi dari pemerintah daerah menyangkut penambahan tersebut.

"Kita juga kaget kenapa aset bisa bertambah seperti itu. Dan

selama ini kita tidak pernah mengetahui aset apa saja yang dibeli pemerintah daerah. Kita minta eksekutif dapat menyajikan data yang akurat dan transparan terkait aset ini," pintanya.

Muhammadiyah mengaku prihatin dengan pemanfaatan dan perawatan aset Pemerintah Kabupaten Pontianak. Sebab, banyak aset yang terbengkalai perawatannya, bahkan tidak jelas keberadaannya.

"Pemerintah daerah tidak profesional dalam mengelola aset yang ada. Buktinya, beberapa kali pansus DPRD, mengungkapkan adanya aset yang tidak jelas keberadaannya atau berada di pihak ketiga. Harusnya permasalahan seperti itu tidak terjadi," tuturnya.

Muhammadiyah mengingatkan pemerintah daerah agar

lebih maksimal dalam pengelolaan aset yang ada. Sebab, aset merupakan investasi milik pemerintah daerah yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Baik keberadaannya, pemanfaatannya hingga hasil investasi aset yang dimaksud.

"Aset itu dibeli oleh pemerintah daerah untuk mendukung kinerjanya. Baik dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat dan lainnya. Jadi aset harus dirawat dan dipelihara dengan sebaik mungkin. Tidak boleh ditelantarkan begitu saja," tegas Muhammadiyah.

Kabid Aset DPPKAD Kabupaten Pontianak, Makmur menjelaskan, kenaikan aset itu merupakan total keseluruhan aset yang ada. Misalnya, aset lancer, aset tetap, investasi jangka panjang dan lainnya.

"Aset tetap merupakan pembe-

lian barang yang tidak bergerak, seperti tanah, gedung, peralatan dan mesin yang kenaikannya hanya berkisar 13,45 persen. Sedangkan yang paling berperan aktif yakni aset lancer. Misalnya yang masuk dalam kas daerah, piutang dan persediaan," ujarnya.

Makmur menjelaskan, kenaikan jumlah aset sebesar 35,47 tersebut juga disebabkan oleh adanya kegiatan proyek di Dinas Pendidikan yang jumlahnya cukup besar. Termasuk disebabkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya.

"Besarnya jumlah SILPA pada tahun 2010 juga memengaruhi laporan tahun 2011. Karena SILPA itu akan tetap tercatat pada tahun berikutnya. Sehingga akan terjadi penambahan," jelas Makmur. (shn)